



ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/pras

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7). Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Pakar: Kedisiplinan Masyarakat Tentukan Akhir Pandemi COVID-19

YOGYAKARTA - Guru Besar Statistika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dedi Rosadi mengatakan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan akan menentukan kapan masa pandemi COVID-19 berakhir.

“Kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol normal baru adalah kunci untuk menghadang kenaikan rate penambahan pasien COVID-19,” kata Dedi melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin (20/7).

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan bersama rekannya alumni FMIPA UGM Joko Kristadi dan Dr Fidelis Diponegoro dengan penelusuran data terakhir dan menggunakan berbagai pendekatan pemodelan data-driven (berbasis pergerakan data), terdapat kenaikan nilai proyeksi kasus positif di akhir pandemi yang cukup signifikan dibanding estimasi yang disampaikan sebelumnya pada Juni 2020.

Menurut Dedi, prediksi paling optimistis dengan menggunakan model hybrid kompartemen SIR-Regresi-runtun-waktu diperkirakan pandemi akan berakhir pada awal November 2020 dengan total kasus positif di sekitar 112 ribu penderita.

Sementara, dengan model Probabilistic Data Driven Model COVID-19 Indonesia diperoleh pandemi akan berpuncak di akhir Juli sampai Akhir Agustus 2020 dan berakhir di akhir Februari 2021 dengan estimasi total kasus positif di sekitar 227 ribu penderita.

Lebih lanjut, dari pantauan terlihat bahwa angka penularan (Rt) masih di atas satu yakni bernilai 1.08 pada tanggal 17 Juli 2020.



ANTARA/HO-Humas UGM
Guru Besar Statistika UGM Prof Dedi Rosadi

Berdasar prediksi tersebut Dedi menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama pada saat ini untuk menganalisis kasus COVID-19 di Indonesia. Pertama, angka penghitungan Rt COVID-19 Indonesia dalam beberapa hari terakhir masih di sekitar 1.08. Angka ini menunjukkan secara nasional masih harus diwaspadai adanya penularan lokal di beberapa wilayah provinsi atau kabupaten yang menjadi episenter penyebaran COVID-19.

Berikutnya, melihat situasi di beberapa negara dunia seperti Jepang, Australia, Maroko, Yunani, Hongkong, Kroasia, Israel terlihat kemunculan pola gelombang kedua dari kasus positif covid setelah dilakukan relaksasi dari kebijakan lockdown.

Kemunculan gelombang kedua, menurut dia, belum terlihat untuk Indonesia. Namun di Indonesia, terlihat adanya peningkatan jumlah penambahan pasien harian (insidensi) dibandingkan masa sebelum dilakukannya era adaptasi kebiasaan baru.

Ia menilai perlu dilakukan pengendalian penyebaran secara lebih optimal di epicenter utama di Indonesia yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian yang dimaksud dengan lebih mengencakan tracing, test & treatment (3T) seiring dengan pendisiplinan masyarakat.

“Pengendalian provinsi-provinsi lain yang berpotensi membahayakan seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan dan Papua perlu dioptimalkan agar Indonesia dapat semakin optimistis menatap ke depan,” kata dia. (ANTARA)

Presiden Minta Penggunaan Dana COVID-19 Harus Cepat, Tepat, dan Akuntabel

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara agar penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi virus Corona tipe baru atau COVID-19, dan Pemulihan Ekonomi Nasional senilai Rp 695,2 triliun harus cepat, namun tetap tepat dan akuntabel.

“Ini penting sekali, apalagi di tahun 2020, dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah *extraordinary* (luar biasa) yang harus dilakukan pemerintah,” kata Presiden saat menerima hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7).

Anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), ujar Presiden, sudah dialokasikan di instrumen fiskal sebesar Rp 695,2 triliun. Dengan jumlah belanja fiskal sebesar itu, Presiden meminta jajaran menteri dan pimpinan lembaga negara

untuk menggunakannya secara hati-hati. “Ini jumlah yang sangat besar sekali Rp 695,2 triliun,” ujar dia.

Namun, Presiden Jokowi tetap mengingatkan agar dana penanganan COVID-19 direalisasikan secara cepat, tepat dan akuntabel, agar setiap kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat. “Saya juga mengharapkan dukungan, bantuan dari BPK agar pengalaman krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari,” ujar dia.

Kepala Negara juga meminta kepada seluruh aparat pengawasan intern pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Penga-



ANTARA/Desca Lidya Natalia/iam

Presiden Joko Widodo

daan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), harus mampu menjadi bagian dari solusi percepatan dan akuntabilitas realisasi anggaran. “Dan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, aspek pencegahan harus dikedepankan, dan memperkuat tata pengelolaan yang baik, yang transparan dan akuntabel,” ujar Presiden.

Dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun anggaran 2019 itu, Ketua BPK

Agung Firman Sampurna menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2019. “Namun penting untuk ditekankan bahwa dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah. BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti,” ujar Agung. (ANTARA)

Presiden Teken PP Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya mengatur pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7).

“Siang tadi bapak Presiden memanggil tim dan beliau telah menandatangani PP terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Airlangga.

Airlangga menyampaikan dalam PP tersebut Presiden memberikan tu-

gas kepada komite kebijakan dan membentuk satu tim untuk mengendalikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Presiden memberikan penugasan kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan tim kebijakan dengan wakil ketua terdiri dari Menko Maritim dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan dan Mendagri. Di dalamnya lengkapi Menkes dan pelaksanaannya diberikan tugas kepada Menteri BUMN yang mengkoordinasikan Ketua Satgas Perekonomian dan Ketua Satgas COVID-19.

“Satgas COVID-19 tetap ditangani Pak Doni (Monardo) dan Satgas Perekonomian ditangani Wamen BUMN Pak Budi Gunawan Sadikin,”

ujar Airlangga.

Adapun tugas tim tersebut adalah melihat situasi perekonomian nasional, perkembangan COVID-19, terkait juga dari segi ketersediaan peralatan tes maupun perkembangan vaksin dan antibodi serta program-program perekonomian yang sifatnya multi years.

“Jadi kita melihat recovery dari pandemi COVID-19 ini akan memakan waktu, dan oleh karena itu Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beringan, dalam arti keduanya ditangani kelembagaan yang sama dan koordinasi maksimal,” ujarnya. (ANTARA)

Pasien Sembuh dari COVID-19 di DIY Bertambah Menjadi 327 Orang

YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di daerah itu pada Senin (20/7) bertambah tiga sehingga total menjadi 327 orang. “Laporan kasus positif yang sembuh pada hari ini sebanyak tiga kasus, sehingga jumlah kasus sembuh menjadi 327 kasus,” kata Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Senin.

Menurut Berty, tiga pasien yang dinyatakan sembuh adalah pasien kasus 281 (laki-laki) berusia 32 tahun asal Kabupaten Bantul, kasus 374 (perempuan) berusia 23 tahun asal Gunung Kidul, dan kasus 382 (perempuan) berusia 29 tahun asal Bantul.

Selain pasien sembuh, ia juga mencatat enam tambahan pasien terkonfirmasi

positif sehingga jumlah kasus positif COVID-19 di DIY menjadi 438 orang. Tambahan kasus positif itu terdiri atas tiga pasien asal Sleman yakni kasus 436 berusia 65 tahun (laki-laki) merupakan hasil skrining pasien rumah sakit, kasus 450 berusia 44 tahun (laki-laki) memiliki riwayat perjalanan Samarinda, dan kasus 451 berusia 23 tahun (perempuan) karyawan rumah sakit.

Tiga pasien positif lainnya berasal dari Bantul yakni kasus 437 berusia 29 tahun (perempuan), kasus 438 berusia 28 tahun (perempuan) skrining petugas kesehatan oleh Dinkes Bantul, serta kasus 439 berusia 50 tahun (perempuan) memiliki riwayat kontak kasus 415.

Menurut dia, tambahan kasus hari ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 564 sampel spesimen yang berasal dari 425 orang.

Berty juga mencatat satu laporan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia dalam proses laboratorium. Pasien yang belum dites swab itu berjenis kelamin laki-laki berusia 74 tahun, asal Gunung Kidul.

Berdasarkan data dari rumah sakit rujukan, ia mencatat total orang dalam pemantauan (ODP) di DIY hingga Senin (20/7) mencapai 8.138 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) yang sudah diperiksa terkait dengan COVID-19 (dengan tes usap) tercatat 2.142 orang.

Dari jumlah PDP tersebut, 1.547 orang di antaranya dinyatakan negatif corona, 438 orang positif di mana 327 orang di antaranya sembuh, dan 12 meninggal, sedangkan yang masih menunggu hasil 157 orang dengan 32 di antaranya telah meninggal. (ANTARA)

Ganjar Minta Pengelola Wisata Kantongi Izin Sebelum Kembali Buka

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para pengelola destinasi wisata mempunyai izin terlebih dulu dari pemerintah setempat sebelum kembali buka saat pandemi COVID-19.

“Kalau mau dibuka harus izin dulu agar semua bisa dikontrol dengan baik, khususnya protokol kesehatannya,” katanya di Semarang, Senin (20/7).

Pemintaan tersebut disampaikan Ganjar saat menanggapi ribuan wisatawan yang mendatangi Objek Wisata Puncak Telomoyo di Ngablak, Kabupaten Magelang, sehingga viral di berbagai media sosial.

Terkait dengan hal itu, Ganjar telah menghubungi pengelola Objek Wisata Puncak Telomoyo untuk menutup tempat wisata alam



ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI.

itu guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

“Itu saya cek kemarin, ternyata gara-gara ada yang membuat vlog negeri di atas awan. Pemandangannya kan bagus. Langsung direspons masyarakat, semua datang. Saya langsung minta ditutup dan memang

sudah ditutup untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Ganjar menegaskan kejadian tersebut tidak boleh terulang sehingga semua pengelola objek wisata harus mengantongi izin untuk kembali membuka kawasan wisata di daerahnya.

Ia mengakui pada kondisi

saat ini banyak masyarakat yang sudah bosan di rumah dan ingin segera piknik serta menikmati pemandangan di sejumlah objek wisata.

“Istilahnya itu mereka kurang piknik, maka kalau melihat apa yang beredar di medsos, langsung menarik dan orang ingin datang. Kalau ini tidak dijaga, kan bahaya,” katanya.

Selain itu, pengelola tempat wisata juga harus mengontrol jumlah pengunjung yang datang apabila kembali buka dan menyesuaikan dengan kapasitas serta harus menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak boleh datang ‘mak byuk’ (berbondong-bondong, red) begitu, semua harus diatur, naka saya minta seluruh daerah menjaga masing-masing, khususnya pengelola pariwisata,” ujarnya. (ANTARA)

BERSEPEDA SAAT PANDEMI

Tren kegiatan bersepeda di Indonesia meningkat kala pandemi COVID-19. Selain memberi ruang khusus bagi pesepeda, pemerintah juga mengatur protokol kesehatan bagi masyarakat ketika bersepeda di ruang publik.

PENGAMANAN

- Helm
- Kaca mata
- Masker
- Pakaian pelindung
- Sarung tangan
- Lampu
- Reflektor cahaya

GOWES DI IBU KOTA

(sesuai Pergub DKI Jakarta No 51/2020)

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mengakomodasi jumlah pesepeda yang melonjak selama pandemi.

- Ruas jalan diutamakan bagi pesepeda untuk jarak yang mudah dijangkau.
- Penggunaan jalur khusus sepeda.
- Penyediaan ruang penyimpanan sepeda di angkutan umum.
- Penyediaan parkir khusus sepeda di Jalan Thamrin - Sudirman (kecuali Minggu).
- Penambahan jalur khusus sepeda di Jalan Thamrin - Sudirman (kecuali Minggu).

PROTOKOL KESEHATAN

(sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No HK 01.07/Menkes/382/2020)

- Pastikan kondisi tubuh sehat. Selalu pakai masker.
- Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- Jangan menyentuh area wajah.
- Menjaga jarak 2 meter - 20 meter dengan pesepeda di depan.
- Mandi dan ganti pakaian setelah di rumah.
- Bersihkan perlengkapan olahraga (sepeda, helm) dan perlengkapan pribadi.
- Perhatikan perkembangan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Tidak hanya selama masa pandemi COVID-19, kami dari Pemprov DKI Jakarta akan terus menyiapkan fasilitas jalur sepeda supaya mereka bertransportasi sepeda dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan.

Syafrin Liputo
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

DATA : PEMPROV DKI JAKARTA/KEMKES Riset : BAYU GRAFIS : TIM EDITOR : HEPPY